















































memperjual-belikan, dan begitu pula bila hanya tindakan memperjual-belikan tanpa niat. Bila seseorang membeli sesuatu untuk dipakai sendiri seperti mobil untuk dikendarai sendiri dengan niat apabila menguntungkan nanti ia akan menjualnya. Maka hal itu juga tidaklah termasuk kekayaan dagang. Hal itu berbeda dengan apabila ia membeli beberapa buah mobil untuk digunakannya sendiri sampai harganya cukup menguntungkan untuk dijualnya, oleh karena penggunaan olehnya sendiri itu tidak mengeluarkan mobil-mobil itu dari sifat barang-barang dagang. Yang menjadi patokan dalam niat itu adalah prinsipnya. Bila prinsipnya adalah untuk dipakai dan digunakan sendiri maka keinginan untuk menjual barang itu kembali bila menguntungkan tidaklah mengubah sifat barang itu sebagai barang dagang. Begitu pula sebaliknya apabila barang itu prinsipnya adalah untuk dijual dan diperdagangkan maka penggunaannya pribadi tidak mengubah sifat barang tersebut sebagai barang dagang tertentu menjadi barang yang akan dipakai sendiri, maka maksud itu, menurut jumhur ulama fikih, sudah mengubah barang itu dari sifat barang dagang menjadi barang untuk dipakai sendiri yang tidak berkembang.

Syarat lain menurut sebagian ulama adalah bebasnya kekayaan dagang dari kemungkinan terkena “dualism zakat” yang dalam perpajakan disebut *double tax* dan oleh Ibnu Qudamah dirumuskan sebagai “pengenaan dua zakat atas suatu barang dalam satu waktu. Hadits menegaskan, “Tidak ada zakat rangkap.” Berdasarkan hal itu

apabila seseorang membeli tanah pertanian untuk dijual lagi, tetapi lebih dahulu ia menanaminya dan sudah mengeluarkan zakat hasil 10%, maka ia tidak harus lagi mengeluarkan zakat tanahnya sendiri, supaya zakat tidak terkena dua kali. Sebagian ulama fikih menentang pendapat itu dan menegaskan bahwa zakat dagangnya juga harus dikeluarkan, sedangkan sebagian lain berpendapat bahwa hal itu harus dikenakan dua zakat, berdasarkan bahwa penyebabnya tidaklah sama yang berarti tidak terjadi zakat rangkap. Setelah kita mengetahui apa yang disebut kekayaan dagang, maka kita membahas syarat zakatnya. Modal dagang adakalanya berupa uang dan adakalanya berupa barang yang dihargai dengan uang.

Mengenai modal berupa uang, persoalannya terang. Tetapi mengenai modal berupa barang, maka syarat wajib zakatnya sama dengan syarat wajib zakat uang, yaitu sudah berlalu masanya setahun, berjumlah minimal tertentu atau sampai senisab, bebas dari hutang, dan lebih dari kebutuhan pokok. Menurut kita, satu nisab uang pada masa kita sekarang sama nilainya dengan harga 85 gram emas. Namun kapankah menentukan barang sudah cukup senisab? Di akhir tahun, kapan saja dalam tahun itu asalkan sudah cukup senisab, ataukah di awal dan di akhir tahun tanpa melihat masa antaranya? Dalam hal ini terdapat tiga pendapat.



Pendapat pertama berasal dari Imam Malik dan juga dari Syafi'i dalam *al-Umm*, nisab itu diperhitungkan di akhir tahun saja, karena nisab erat sekali kaitannya dengan harga barang tersebut, sedangkan menilai harga barang dagang setiap waktu adalah suatu pekerjaan amat sulit. Oleh karena itu masa wajibnya adalah pada akhir tahun yang berlainan dengan masa wajib zakat objek-objek zakat lain karena nisabnya dihitung dari bendanya yang tidak sulit menghitung. Menurut pendapat kedua, nisab itu harus diperiksa setiap waktu. Bila nisab tidak cukup pada suatu waktu, maka tempo batal oleh karena kekayaan dagang adalah kekayaan yang memerlukan perhitungan nisab dan waktu.

Oleh karena itu jumlah senisab penuh harus konstan pada setiap waktu, begitu juga ketentuan-ketentuan lainnya yang juga harus konstan setiap waktu tersebut. Ini adalah pendapat Tsauri, Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsaur, dan Ibnu Mundzir. Menurut pendapat ketiga, perhitungan cukup senisab dilakukan pada awal dan akhir tahun, bukan dalam antara kedua masa itu. Bila nisab sampai pada salah satu awal atau akhir tahun, maka zakat wajib dikeluarkan, sekalipun sebelum waktu itu nisab itu belum cukup. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan kawan-kawannya. Alasannya sama dengan alasan pendapat pertama, yaitu bahwa penilaian harga barang dagang pada setiap saat adalah sulit, karena harus diketahui berapa harga setiap barang pada setiap waktu untuk mengetahui apakah nilai

harga seluruh barang sudah sampai nisab atau belum. Oleh karena sulitnya maka perhitungannya dilakukan di awal dan akhir tahun saja.

Bila seseorang memiliki sejumlah barang yang berharga belum sampai nisab, lalu setengah tahun kemudian berkembang sampai seharga nisab, atau harga barang naik sehingga harganya cukup nisab, atau ia menjualnya sampai seharga nisab, atau sementara itu ia memperoleh barang lain atau uang yang membuat harga barang itu cukup nisab, maka menurut *Jumhur* tempo wajib zakat barang itu sudah sampai sedangkan keadaan sebelumnya tidak mempengaruhi. Tetapi bagi Imam Malik dan demikian juga bagi Syafi'i di dalam *al-Umm* masa itu jatuh tempo ada hubungan dengan nisab dan nisab dihitung di akhir tempo.

Oleh karena itu bila nisab sampai pada akhir tahun tersebut, maka ia harus berzakat. Dalam hal ini Malik mengatakan, "Bila seseorang memiliki lima dinar (yaitu seperempat nisab), lalu ia mendagangkannya dan temponya sudah jatuh sedangkan jumlahnya sudah terkena kewajiban zakat, maka ia harus mengeluarkan zakatnya. Yang benar menurut saya adalah pendapat Malik dan yang lebih baik lagi adalah pendapat Syafi'i, oleh karena mempersyaratkan satu nisab harus berumur satu tahun tidaklah mempunyai satu landasan apapun dan tidak pula didukung oleh satu pun hadits shahih.









pertanyaan itu perlulah diperhatikan pendapat beberapa ulama *tabi'in* tentang hal itu yang dilaporkan oleh Abu Ubaid.

Maimun bin Milbran berkata, “Apabila sudah tiba temponya kau berzakat, hitunglah berapa jumlah uang kontan yang ada padamu dan barang yang ada, hitung berapa nilai barang itu, begitu juga piutang yang ada pada orang yang mampu, kemudian keluarkan hutangmu sendiri, barulah dikeluarkan zakat dari sisa. “Hasan Basri berkata, “Bila bulan seorang harus membayar zakatnya sudah datang, maka ia menghitung zakatnya dari uang yang ada di tangannya, barang yang terjual, dan semua piutangnya, kecuali piutang yang belum jelas dan tidak mungkin diharapkan kembali. “Ibrahim Nakha'i berkata, “Seseorang harus menghitung harga barang dagangannya, bila sudah sampai temponya, maka ia harus mengeluarkan zakatnya bersama dengan uang lain.

Dari pendapat-pendapat diatas itu jelas bahwa seorang pedagang Muslim, bila tempo seharusnya ia berzakat sudah sampai, harus menggabungkan seluruh kekayaan: modal, laba, simpanan, dan piutang yang diharapkan bisa kembali, lalu mengosongkan semua dagangannya dan menghitung semua barang ditambah dengan uang yang ada, baik yang digunakan untuk perdagangan maupun yang tidak, ditambah lagi dengan piutang yang diharapkan bisa kembali, kemudian mengeluarkan zakatnya sebesar 2.5%. sedangkan piutang













bahwa yang dizakatkan harus dari barangnya, tidak boleh uang senilai harga barang tersebut. Muzni mengatakan bahwa zakat barang dagang haruslah barang itu sendiri, bukan uang sehargaanya. Ahmad begitu juga Syafi'i dalam fatwanya yang lain mengatakan bahwa zakat harus dikeluarkan berupa uang bukan berupa barang. Oleh karena nisab barang dagang dihitung berdasarkan harganya.

Oleh karena itu zakat yang dikeluarkan adalah berupa uang yang sama sifatnya dengan barang itu sendiri dalam barang-barang wajib zakat lainnya. Dalam *al-Mughni* dikatakan, "Kita tidak menerima pendapat bahwa zakat wajib dikeluarkan berupa barang, yang benar adalah berupa uang." Pendapat yang terakhir inilah yang lebih kuat ditinjau dari segi kepentingan fakir miskin, oleh karena mereka dapat membeli apa yang mereka butuhkan dengan uang tersebut. Sedangkan barang kadang-kadang tidak diperlukannya, lalu dijualnya dengan harga yang rendah. Pendapat itulah seharusnya yang diambil, bila pemerintahlah yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, karena lebih tepat dan mudah. Pendapat pertama dapat diterima dalam keadaan tertentu merupakan pengecualian, yaitu apabila yang mengeluarkan zakat adalah pedagang itu sendiri dan ia tahu betul bahwa fakir miskin memerlukan barang tersebut. Manfaat zakat demikian memang jelas, tetapi hal itu hanya berdasarkan kepentingan tertentu, yang dalam kasus seperti itu tidak ada landasan nashnya. Setelah saya menegaskan bahwa pendapat terakhir itulah yang lebih

























menghadiahkan sesuatu miliknya, bukan dengan ikhtiyarnya, sudah pasti perbuatannya itu tidak sah.

b. *Mauhub Lah* (penerima), hadiah itu merupakan transaksi langsung, maka penerima hadiah disyaratkan sudah wujud dalam artinya yang sesungguhnya ketika akad hadiah dilakukan. Oleh sebab itu, hadiah tidak boleh diberikan kepada anak yang masih dalam kandungan. Dalam persoalan ini, pihak penerima hadiah tidak disyaratkan supaya baliq berakal. Kalau sekiranya penerima hadiah belum cakap bertindak ketika pelaksanaan transaksi, ia diwakili oleh walinya.

c. *Mauhub* (barang yang dihadiahkan), barang yang dihadiahkan kepada penerima hadiah. Adapun syarat dalam *mauhub* (barang yang dihadiahkan) yang akan diberikan yaitu:

1. Benda yang dihadiahkan tersebut mestilah milik yang sempurna dari pihak pemberi hadiah. Ini berarti bahwa hadiah tidak sah bila sesuatu yang dihadiahkan itu bukan milik sempurna dari pihak pemberi hadiah.
2. Barang yang dihadiahkan itu sudah ada dalam arti yang sesungguhnya ketika transaksi hadiah dilaksanakan. Tidak sah menghadiahkan sesuatu yang belum berwujud.
3. Objek yang dihadiahkan itu mestilah sesuatu yang boleh dimiliki oleh agama. Tidaklah dibenarkan menghadiahkan













